

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang berjudul “ Analisis Peran UN Women dalam menangani kekerasan wanita terhadap suku dalit di India” dapat dilihat bahwa hadirnya UN Women di India telah memberikan kontribusi yang besar dalam memajukan perlindungan dan pemberdayaan perempuan Dalit yang menghadapi diskriminasi dan kekerasan berlapis akibat kondisi struktural yang kompleks. UN Women mengimplementasikan berbagai program pemberdayaan berbasis komunitas, termasuk Dalit Women’s Livelihood Accountability Initiative (DWLAI), yang fokus pada peningkatan akses perempuan Dalit atas hak ekonomi dan sosial seperti yang diatur dalam Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA). Program ini berhasil meningkatkan kapasitas perempuan Dalit untuk mengakses pekerjaan dan hak-hak mereka secara lebih efektif, serta membangun kepemimpinan di tingkat lokal melalui pelatihan teknis dan administrasi yang intensif.

Secara normatif, UN Women juga berkontribusi dalam mendorong reformasi kebijakan dan memperkuat kerangka hukum yang mengakui kerentanan ganda perempuan Dalit terhadap diskriminasi berbasis gender dan kasta. Melalui advokasi di forum-forum internasional, seperti Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) dan Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), UN Women membuka ruang bagi suara perempuan Dalit sehingga isu kekerasan dan impunitas pelaku dapat dikenal secara global serta mendapatkan tekanan moral bagi pemerintah India agar memperkuat perlindungan hukum.

Meskipun capaian tersebut penting, intervensi UN Women tidak sepenuhnya efektif dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan Dalit selama periode tersebut. Data resmi dari National Crime Records Bureau memperlihatkan peningkatan kasus yang konsisten, yang mengindikasikan adanya hambatan struktural seperti budaya impunitas, bias sistem hukum, dan resistensi sosial yang masih sangat kuat. Hal ini juga menunjukkan tantangan dalam memperluas dampak program di konteks yang lebih luas, terutama di daerah terpencil yang kurang terjangkau oleh infrastruktur pendukung serta kesulitan kolaborasi lintas sektor. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan, termasuk reformasi kelembagaan dan penguatan mekanisme perlindungan serta akuntabilitas di tingkat lokal dan nasional.

Saran untuk penelitian selanjutnya meliputi eksplorasi mendalam mengenai efektivitas langkah-langkah UN Women di komunitas akar rumput yang beragam secara geografis dan budaya, serta analisis perbedaan capaian program antara wilayah dengan dukungan jaringan lokal yang kuat dan wilayah yang minim dukungan. Evaluasi internal program perlu diperkuat agar dapat menemukan metode intervensi yang paling tepat dan adaptif terhadap hambatan kontekstual. Penelitian berikutnya juga dianjurkan untuk mengeksplorasi penggabungan strategi advokasi lintas negara dan pendekatan partisipatif yang lebih intensif, menempatkan perempuan Dalit sebagai agen utama perubahan agar kebijakan perlindungan dan pemberdayaan benar-benar inklusif dan berorientasi pada kebutuhan nyata di lapangan. Penekanan pada integrasi aspirasi komunitas Dalit dalam proses pembuatan kebijakan serta peningkatan sinergi antara UN Women, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil lokal akan menjadi kunci untuk menciptakan transformasi sosial yang berkelanjutan.

Dengan demikian, meskipun UN Women telah memberikan kontribusi signifikan dalam penguatan kapasitas dan advokasi hak perempuan Dalit, tantangan struktural yang mendalam memerlukan usaha yang lebih intens dan terpadu agar peran institusi internasional ini dapat menghasilkan perubahan nyata dan berkelanjutan bagi perlindungan serta keadilan bagi perempuan Dalit di India.